

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)**

**KECAMATAN
MARITENGGAE**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan dibmasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pangkajene, 05 Agustus 2024
CAMAT MARITENGGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
II.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	6
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	13
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
III.1. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2024	8
Tabel III.1. Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2024	15
Tabel III.2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	21
Tabel III.3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kantor Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Maritengngae dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ;

10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Maritengngae adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

- BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP**

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 28,60%.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 51,13%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri atas sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan telah mencapai tingkat realisasi target 28,50%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang**

OPD : KANTOR KECAMATAN MARITENGGAE

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7		Unsur Kewilayahan								
7	01	Kecamatan								
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100		100	100
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100	100	100

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	30	Urusan	30				30	750
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Urusan	3				3	75
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.525	Orang	7.525				7.525	188.125
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%						
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Kelurahan	20				20	500

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117	Orang	113				113	2.825
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	21	Kelurahan	21				21	525
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100				100	2.500
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100				100	2.500
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	Desa	15				15	375
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15	Desa	15				15	375
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15	Desa	15				15	375
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%						

X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bulan	36				36	900
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%						
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36	Bulan	36				36	900
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Bulan	36				36	900
x	xx	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36	Bulan	36				36	900
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Bulan	33				33	825
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Bulan	21				21	525
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%						
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Bulan	36				36	900

X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	36	Bulan	35				35	875	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	36	Bulan	32				32	800	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Bulan	30				30	750	
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	35				35	875	
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%							
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Bulan	33				33	825	
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Bulan	33				33	825	

Tabel II.1. b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN MARITENGGAE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)	
7		Unsur Kewilayahan									
7	01	Kecamatan									
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	0	0	0	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100	0	0	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan	3	0	0

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan		3	0	0	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%		100	50	50	50	1.250
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%		100	50	50	50	1.250
7	01	02	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen		2	1	50	1	25
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100	13	13	13	317
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100	0	0	0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan		5	0	0	0	0

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%		100	25	25	25	635
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit		21	8	38	8	200
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210	Pokmas/Ormas		210	80	38	80	2.000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan		7	0	0	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%		100	0	0	0	0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%		100	0	0	0	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dokumen		5	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dokumen		5	0	0	0	0

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen		5	0	0	0	0
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%		100	34	34	34	840
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		100	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0

X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%		100	50	50	50	1.250
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812	Bulan		812	406	50	406	10.150
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		100	40	40	40	990
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	Paket		8	8	100	8	200
x	xx	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Paket		8	0	0	0	0
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	Paket		8	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		8	4	50	4	100
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	Laporan		8	3	38	3	75
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan		8	4	50	4	100

X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%		100	21	21	21	521
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Unit		16	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	24	Unit		24	10	42	10	250
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100	63	63	63	1.563
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	Laporan		8	3	38	3	75
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Laporan		8	3	38	3	75
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan		8	9	113	9	225
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100	29	29	29	716
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	Unit		16	7	44	7	175
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit		16	6	38	6	150

X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		3	1	33	1	25
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit		3	0	0	0	0

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Maritengngae maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang

menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 84,22 peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024													
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN									
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
7	Unsur Kewilayahan															
7	01	Kecamatan			7.544.980.000				7.574.980.000							
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Maritenggae	100	%	4.000.000	Kecamatan Maritenggae	Kecamatan Maritenggae	100	%	4.200.000	Kecamatan Maritenggae		
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritenggae	100	%	4.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritenggae	Kecamatan Maritenggae	100	%	4.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritenggae	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Maritenggae	3	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritenggae	Kecamatan Maritenggae	3	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritenggae
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritenggae	3	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritenggae	Kecamatan Maritenggae	3	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritenggae

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Maritengngae	100	%	50.000.000	Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	80.000.000	Kecamatan Maritengngae
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	80.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	80.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae	100	%	1.754.105.300	Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	1.742.514.900	Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae	100	%	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae	100	%	1.752.105.300	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	1.740.414.900	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Maritengngae	21	Unit	477.385.300	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	21	Unit	468.114.900	Masyarakat Kecamatan Maritengngae

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	210	Pokmas/Ormas	1.272.720.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	210	Pokmas/Ormas	1.270.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.300.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	6.300.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.100.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.100.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.100.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Maritengngae	100	%	5.730.874.700	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	5.741.965.100	ASN Kecamatan Maritengngae

X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	4.758.639.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	4.758.639.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	812	Bulan	4.758.639.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	812	Bulan	4.758.639.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	274.442.700	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	144.102.700	ASN Kecamatan Maritengngae
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	4.538.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	2.538.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	9.756.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	-	-	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	134.564.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	-	-	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	29.540.200	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	29.780.200	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	21.966.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	23.251.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	74.078.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	88.533.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	49.542.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	43.542.000	ASN Kecamatan Maritengngae

X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit		ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.07	06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	49.542.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	43.542.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	444.070.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	589.100.400	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	12.866.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	12.210.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	87.404.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	82.647.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	343.800.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	494.243.400	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100	%	204.181.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	100	%	206.581.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	52.941.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	52.940.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	13.870.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	12.510.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	137.370.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	141.131.000	ASN Kecamatan Maritengngae

X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Maritenggae	3	Unit	ASN Kecamatan Maritenggae	Kecamatan Maritenggae	3	Unit	-	ASN Kecamatan Maritenggae
---	----	----	------	----	---	---	-----------------------	---	------	---------------------------	-----------------------	---	------	---	---------------------------

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae;
4. Kantor Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.